

## **Sinopsis**

Skripsi dengan judul "Peran Ombudsman Daerah Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemda Kabupaten Bangka Tahun 2005-2007" dilatar belakangi oleh mekanisme rekrutmen anggota ombudsman Bangka kurang begitu transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Inisiasi pembentukan ombudsman hanya datang dari beberapa orang saja yang tergabung dalam KPPOD. Sejak dibentuknya ombudsman Bangka pada bulan Pebruari s/d Juni 2006 ombudsman Bangka hanya menerima 14 laporan. Hampir semua laporan tersebut tindak lanjutnya dilakukan dengan cara mendatangi instansi terlapor dan memberikan saran secara lisan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana peran ombudsman daerah Kabupaten Bangka dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Pemda Kabupaten Bangka Tahun 2005-2007? Upaya apa yang dilakukan ombudsman dalam meningkatkan perannya?

Untuk mengetahuinya penulis mengadakan penelitian melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan ketua Ombudsman daeah, wakil ketua Ombudsman daerah. Sedangkan data sekunder berupa data-data dokumentasi yang diperoleh dari dokumen Ombudsman Daeah dan data pustaka.teknik analisa data yang digunakan penulis yaitu teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat 26 laporan. Semua laporan tersebut diterima oleh KOD dari para korban secara langsung yaitu sebanyak 23 laporan, malalui surat 1 laporan dan melalui media 2 laporan. dari laporan tersebut yang paling banyak substansi yang dilaporkan ialah menyangkut substansi penundaan berlarut sebanyak 7 laporan, diikuti oleh substansi bertindak sewenang-wenang 5 laporan. Semua laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh KOD baik melalui rekomendasi secara tertulis maupun dengan rekomendasi secara lisan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah keberadaan ombudsman memang sangat diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Pemda Kabupaten Bangka, sedangkan laporan yang diterima ombudsman dalam masa periode 2005-2007 sebanyak 26 laporan, semua laporan mendapat tanggapan dari pihak yang terlapor. Kendala yang ditemui ombudsman ialah payung hukum yang kurang tinggi. Masyarakatnya sendiri kurang begitu berani melaporkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat-birokrat pemerintah. Program kerja yang dilakukan oleh ombudsman dikelompokkan menjadi dua yaitu sosialisasi dan menghadiri undangan serta kerja sama. Saran untuk meningkatkan peran dan fungsi ombudsman sebaiknya kegiatan yang dilakukan lebih diperbanyak yaitu sosialisasi, supaya masyarakat lebih paham apa itu